

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Kota Padang pada saat dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah pada tahun 2013-2016 menunjukkan persentase sebesar 91,50% dengan kriteria nilai interpretasi efektif. Sedangkan kontribusi PBB Kota Padang terhadap Pajak Daerah dan PAD dalam empat tahun periode 2013-2016 berfluktuatif, terkadang mengalami peningkatan dan sewaktu-waktu mengalami penurunan. Rata-rata kontribusi PBB Kota Padang terhadap Pajak Daerah sebesar 14,03% dengan kriteria nilai interpretasi kurang, sedangkan rata-rata kontribusi PBB Kota Padang terhadap PAD sebesar 9,10% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Pendaerahan PBB Kota Padang pada tahun 2013 bernilai interpretasi efektif terhadap penerimaan target yang terealisasi oleh PBB Kota Padang. Namun demikian, tingkat kontribusi yang diberikan PBB Kota Padang terhadap Pajak Daerah dan PAD, maupun untuk laju pertumbuhan PBB Kota Padang masih sangat rendah. Dapat diartikan PBB Kota Padang masih belum menjadi sumber terbesar atas penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kota Padang.
2. Untuk rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Padang sejak tahun 2011 dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Efektivitas penerimaan BPHTB Kota Padang pada tahun 2013-2016 menunjukkan persentase sebesar 95,86% dengan kriteria nilai interpretasi efektif. Sedangkan kontribusi BPHTB Kota Padang terhadap Pajak

Daerah dan PAD dalam empat tahun periode 2013-2016 berfluktuatif, terkadang mengalami peningkatan dan sewaktu-waktu mengalami penurunan. Untuk rata-rata kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah sebesar 9,36% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, sedangkan rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD sebesar 6,37% dengan kriteria interpretasi sangat kurang. Pendaerahan BPHTB pada tahun 2011 bernilai interpretasi efektif terhadap penerimaan target yang terealisasi oleh BPHTB Kota Padang. Namun demikian, tingkat kontribusi yang diberikan BPHTB Kota Padang terhadap Pajak Daerah dan PAD, maupun untuk laju pertumbuhan BPHTB Kota Padang masih sangat rendah. Dapat diartikan BPHTB Kota Padang masih belum menjadi sumber terbesar atas penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kota Padang.

3. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kota Padang menunjukkan persentase sebesar 81,40% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif. Untuk Pajak Sarang Burung Walet sendiri merupakan pajak daerah baru yang berlaku mulai bulan Januari tahun 2012. Pajak Sarang Burung Walet, rata-rata kontribusinya terhadap Pajak Daerah sebesar 5,18% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dan rata-rata kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD sebesar 5,95% dengan kriteria sangat kurang. Pajak Sarang Burung Walet sebagai pajak daerah yang baru diberlakukan pada tahun 2012 bernilai interpretasi cukup efektif terhadap penerimaan target yang terealisasi. Namun, Pajak Sarang Burung Walet belum memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan dalam Pajak Daerah maupun PAD, dikarenakan tidak ada lagi potensi sarang burung walet

itu sendiri. Untuk laju pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet pun masih sangat rendah.

5.2 Keterbatasan Penulisan

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hasil penelitian tidak dapat menunjukkan keseluruhan jenis-jenis pajak daerah. Seperti yang dibahas sebelumnya, pajak daerah merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD. Jadi, jika hanya dibahas tiga jenis pajak daerah saja (PBB P2, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet) belum mencerminkan tingkat efektivitas seluruh pajak daerah terhadap penerimaan PAD. Sehingga belum dapat disimpulkan efektivitas masing-masing pajak daerah terhadap PAD.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan jumlah variabel yang diteliti, sehingga jika seluruh jenis-jenis pajak daerah dijadikan variabel, maka akan dapat melihat tingkat efektivitas masing-masing pajak daerah terhadap penerimaan PAD. Dikarenakan pajak daerah memiliki berkontribusi besar terhadap PAD.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak untuk setiap masing-masing pajak daerah yang nantinya dapat dilihat seberapa besar pengetahuan wajib pajak terhadap salah satu pajak daerah yang dibayarkannya, termasuk seberapa besar kontribusi wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya.